

# **PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA PEGAWAI TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT DI KOTA KUPANG**

## **ABSTRAK**

Sektor publik merupakan suatu entitas atau organisasi yang kegiatannya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik demi kebutuhan dan hak publik, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, transportasi publik, penegakan hukum, penyediaan barang publik sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan lainnya. Adapun sumber dana atau pembiayaan sektor publik berasal dari masyarakat berupa pajak dan retribusi. Selain itu juga berasal dari laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah dan pendapatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indra Bastian, 2010). Sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik atas penggunaan sumber dana tersebut haruslah membuat laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik adalah informasi keuangan yang disajikan oleh organisasi publik untuk membantu para penggunanya dalam mengambil keputusan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Operasional (LO) , (3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) , (4) Neraca, dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Laporan keuangan ini harus disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan harus mengikuti prosedur yang telah diatur pada SAP, sehingga diharuskan bagi organisasi sektor publik dalam hal ini yaitu instansi pemerintahan untuk mematuhi prosedur dalam pedoman tersebut. Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup memadai. Agar menghasilkan informasi keuangan yang baik tentunya harus dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah tanpa terkecuali termasuk di dalamnya adalah Kantor-Kantor

Camat di Kota Kupang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dengan tingkat pendidikan yang memadai, seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Setiap orang yang memiliki pengalaman yang luas, akan lebih mudah berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaannya baik di organisasi, perusahaan maupun juga di pemerintahan. Pengalaman adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik (Teguh, 2008). Semakin lama pegawai bekerja dalam bidang di organisasi, maka akan semakin berpengalaman pegawai tersebut dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja pegawai terhadap penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat Di Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pada 6 Kantor Camat di Kota Kupang. Sampel diambil berdasarkan kriteria yaitu pegawai pada bagian keuangan dengan responden sebanyak 30 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 20 *for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan, dan (2) Pengalaman kerja berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan.

Bagi kantor kecamatan disarankan agar dapat meningkatkan kompetensi pegawai dalam menyusun laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang tidak terlepas dari faktor tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan variabel-

variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dilakukan koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas seperti pengawasan keuangan, sistem informasi keuangan daerah dan faktor lainnya yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperbanyak jumlah sampel dan juga memperluas wilayah penelitian, sehingga hasil penelitian yang didapatkan lebih baik dari penelitian ini.

***Kata kunci : penyusunan laporan keuangan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja***